

Analisis Efisiensi dan Transparansi APBN Indonesia : Studi Kasus Tahun Terbaru

Sernanda Putri Darma¹, Nur Haliza², Dela Aulia Br Ginting³, Putri Kemala⁴
^{1,2,3,4} Universitas Negeri Medan
*sernanda12@gmail.com¹, nhaliza065@gmail.com², dellaginting@gmail.com³
putrikemala@unimed.ac.id⁴*

ABSTRACT

This study tries to present an analysis of the efficiency and transparency of the 2023 APBN in Indonesia. This research then uses comparative descriptive qualitative analysis by collecting data, classifying, analyzing and comparing targets with budget realization in accordance with appropriate theory. The aim of this research is to determine the implementation of the State Revenue and Expenditure Budget efficiently and economically, efficiently and effectively. The data sources used in this research are financial reports, especially the budget and budget realization between the 2023 fiscal year period obtained from book II of the financial notes along with the state income and expenditure budget of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

Keywords : *Efficiency, Transparency, 2023 APBN, Indonesia.*

ABSTRAK

Studi ini mencoba menghadirkan suatu analisis efisiensi dan transparansi APBN 2023 di Indonesia. Penelitian ini kemudian menggunakan analisis kualitatif deskriptif komparatif dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasikan, menganalisis serta membandingkan target dengan realisasi anggaran sesuai dengan teori yang sesuai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara efisien dan transparansi secara ekonomis, efisien dan efektif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan khususnya pada anggaran dan realisasi anggaran antara periode tahun anggaran 2023 yang diperoleh dari buku II Nota keuangan beserta anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kata kunci : Efisiensi, Transparansi, APBN 2023, Indonesia.

PENDAHULUAN

Anggaran negara adalah urat nadi bagi suatu negara dalam menjalankan pemerintahan. Pengertian anggaran (*budget*) menurut Robert D Lee, Jr dan Ronald W Johnson adalah "A document or a collection of documents that refer to the financial condition of an organization (family, corporation, government), including information on revenues, expenditures, activities, and purposes or goals". Terjemahan bebas pengertian anggaran tersebut adalah dokumen yang menunjukkan kondisi atau keadaan keuangan suatu organisasi (keluarga, perusahaan, pemerintah) yang menyajikan informasi mengenai pendapatan, pengeluaran, aktivitas dan tujuan yang hendak dicapai.

Di Indonesia anggaran negara setiap tahun disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN secara filosofi adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat sehingga penetapannya dilakukan setiap tahun dengan undang-

undang. APBN pada dasarnya sebagai bentuk kepercayaan rakyat kepada pemerintah untuk mengelola keuangan negara sehingga pengelolaannya diharapkan dapat memenuhi syarat akuntabilitas (accountability), transparan (transparency), dan kewajaran (fairness). Hampir di semua negara yang berlandaskan hukum, ketentuan mengenai anggaran belanja negara ditetapkan dalam konstitusi.

Salah satu hal yang menjadi perhatian penting dalam perkembangan sebuah Negara adalah anggaran pendapatan dan belanja (Ariel et al., 2022). Di bidang ekonomi anggaran bukan hanya berfungsi untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah tetapi belanja digunakan sebagai alat kebijakan (Fanggidae & Manafe, 2019). Pada saat perekonomian sedang melemah dan sektor swasta tidak dapat berjalan dengan baik maka belanja pemerintah akan digunakan sebagai pedal dalam mendorong perekonomian secara menyeluruh (Rusmita, 2016). Belanja pemerintah diusulkan oleh presiden dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tertuang dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN). Bentuk dari pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan negara/daerah selama satu periode anggaran tertentu dikenal dengan laporan keuangan pemerintah (Susanti et al., 2021). Dalam pelaksanaannya, APBN sering menimbulkan berbagai penyimpangan, penyalahgunaan dan konflik antara pemerintah dan masyarakat sehingga diperlukan pelaksanaan anggaran yang transparan (Rusmita, 2016), (Susanti et al., 2021). Bentuk dari konflik yang sering terjadi antara lain pembohongan publik atau yang sering dikenal dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Susanti et al., 2021).

Dalam tata kelola pemerintah yang baik, mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap penentuan kebijakan publik. Karenanya untuk mewujudkan good governance pada tahun 2008, disahkanlah undang-undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yang mana undang-undang tersebut merupakan legal standing bagi public untuk mendapatkan pelayanan dalam hal mengakses informasi public, serta kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan informasi yang lengkap. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Good Governance adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Aulia & Nugraheni (2022) melakukan penelitian untuk mengetahui tingkat efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang pada tahun anggaran 2017-2021 melalui analisis Value for Money. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Deskriptif Kuantitatif dengan data yang diperoleh melalui situs website PPID Pemerintah Kota Semarang berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan menyebutkan bahwa hasil pengukuran rata-rata yang diperoleh dalam kurun waktu 5 tahun sejak tahun 2017 hingga 2021 mencapai kriteria efektif dengan capaian rata-rata sebesar 97,82%, yang artinya selama 5 tahun tersebut Pemerintah Kota Semarang telah mencapai keberhasilan kerjanya dalam menjalankan tugas hingga mencapai tujuan.

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan pengeluaran daerah sehingga publik dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang rencana anggaran pemerintah daerah dalam suatu tahun anggaran tertentu Abdul (2019: 30). Transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah merupakan tuntutan publik yang harus direspon secara positif. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut (Mahmudi, 2019: 3)

Selanjutnya, ada hal yang menarik jika melihat kajian-kajian akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintah dalam satu dekade terakhir. Kajian-kajian tersebut cenderung berfokus kepada transformasi pemerintah di berbagai belahan dunia untuk lebih akuntabel dan transparan kepada publik dengan menggunakan bantuan teknologi informasi, seperti dengan menggunakan website resmi atau aplikasi resmi pemerintah (Alcaraz-Quiles et al., 2015; Navarro Galera et al., 2014).

MEODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif komparatif dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasikan, menganalisis serta membandingkan target dengan realisasi anggaran sesuai dengan teori yang sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang lebih menekankan analisis pada data-data numeric (angka) sehingga hasil yang akan diperoleh adalah hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti dan kesimpulannya akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti. Operasionalisasi variabel yang digunakan dalam penelitian adalah Pengelolaan keuangan Negara yang memiliki empat indikator, yaitu Tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan, dan tahap evaluasi kinerja. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi berupa data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif karena digunakan untuk menganalisis data transparansi pengelolaan keuangan pemerintah Negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada efisiensi umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik, alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflansi, perubahan kurs rupiah dan penyesuaian factor makro ekonomi. Namun demikian pemerintah harus dapat mengendalikan belanja negara, melakukan efisiensi belanja dan penghematan anggaran. Efisiensi lebih menitik beratkan pada kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan penggunaan sumber daya yang lebih hemat. Efisiensi dapat dilihat dari dua sisi yaitu kempuan organisasi untuk menggunakan sejumlah sumber daya tertentu untuk mendapatkan hasil yang lebih besar.

Menurut Mahmudi (2007) efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dan *input*. *Output* merupakan realisasi belanja untuk memperoleh penerimaan negara

dan *input* merupakan realisasi dan penerimaan negara dalam hal ini adalah pendapatan.

**Table 1. Anggaran Pendapatan Negara 2023
(triliun rupiah)**

No.	Uraian	APBN 2023
I.	PENDAPATAN DALAM NEGERI	2.462,6
	1. Penerimaan Perpajakan	2.021,2
	a. Penerimaan Pajak	1.718,0
	b. Kepabeanan dan Cukai	303,2
	2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	441,4
	a. Sumber Daya Alam	196,0
	1) SDA Migas	131,2
	2) SDA Nonmigas	64,8
	b. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	49,1
	c. PNBPN Lainnya	113,3
	d. Pendapatan BLU	83,0
II.	HIBAH	0,4
	PENDAPATAN NEGARA	2.463,0

Sejalan dengan pemulihan ekonomi, peningkatan efektivitas UU HPP, serta optimalisasi PNBPN melalui inovasi layanan dan reformasi pengelolaan aset secara produktif, pendapatan negara pada APBN tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp2.463,0 triliun Kontribusi pendapatan negara terutama berasal dari penerimaan perpajakan dan PNBPN.

Penerimaan Perpajakan dalam APBN tahun anggaran 2023 ditargetkan mencapai Rp2.021,2 triliun atau tumbuh 5,0 persen. Optimalisasi Penerimaan Perpajakan sejalan dengan pemulihan ekonomi dan dukungan efektivitas implementasi kebijakan (Undang-Undang HPP, penguatan pengawasan dan kepatuhan, serta reformasi administrasi perpajakan. Di sisi lain Pemerintah akan terus mewaspadai faktor risiko pelemahan perekonomian global dan moderasi harga komoditas yang dapat memengaruhi penerimaan perpajakan tahun 2023.

Selanjutnya PNBPN diperkirakan mencapai Rp441,4 triliun Beberapa faktor yang akan mempengaruhi PNBPN tahun 2023 adalah proyeksi pergerakan harga komoditas yang diperkirakan mengalami moderasi. Sementara itu, kontribusi Penerimaan dari Kekayaan Negara Dipisahkan diupayakan dapat ditingkatkan. Selanjutnya, target penerimaan hibah pada APBN tahun anggaran 2023 sebesar Rp0,4triliun sesuai proyeksi hibah luar negeri yang terencana baik yang dikelola oleh K/L maupun diteruskan hibahkan ke daerah sesuai dengan nota kesepakatan (Momerandum of Understanding)

**Tabel 2. Anggaran Belanja Negara 2023
(triliun rupiah)**

Sumber: Kementerian Keuangan

No.	Uraian	APBN 2023
1.	Belanja Pemerintah Pusat	2.246.457,9
2.	Transfer ke Daerah (TKD)	814.718,5
ANGGARAN BELANJA NEGARA		3.061.176,3

Tahun 2022 merupakan tahun terakhir dari masa relaksasi pelebaran defisit, sehingga belanja negara yang dirancang responsif dan konsolidatif tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pemulihan ekonomi. Belanja negara pada APBN tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp3.061.176,3 miliar, yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.246.457,9 miliar (73,4 persen terhadap belanja negara) dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp814.718,5 miliar (26,6 persen terhadap Belanja Negara).

**Table 2.1. Belanja Pemerintahan Pusat 2023
(triliun rupiah)**

Sumber: Kementerian Keuangan

No.	Uraian	APBN 2023
1.	Belanja K/L	1.000,8
2.	Belanja Non-K/L	1.245,6
Jumlah		2.246,5

Untuk mencapai tujuan tersebut BPP dalam APBN tahun anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp2.246.457,9 miliar. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk melaksanakan program-program prioritas antara lain sebagai berikut: (1) Meningkatkan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan (PIP, KIP Kuliah); (2) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (a.l dengan penguatan pelayanan kesehatan primer dan sekunder, peningkatan upaya promotif-preventif, dan peningkatan manfaat program JKN); (3) mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan pembangunan SDM jangka Panjang antara lain melalui perbaikan data dan targeting Perlinsos melalui Registrasi sosial ekonomi; (4) memenuhi kewajiban Pemerintah untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang; (5) menjaga stabilitas dan daya beli masyarakat khususnya golongan miskin dan rentan melalui pemberian subsidi; (6) mengakselerasi pembangunan infrastruktur dasar untuk pemenuhan layanan dasar; dan (7) menyediakan fiscal buffer untuk mengantisipasi dan mitigasi risiko fiskal dalam pelaksanaan APBN.

**Table 2.2 Transfer ke Daerah 2023
(triliun rupiah)**

Sumber: Kementerian Keuangan

Uraian	APBN 2023
1. Dana Bagi Hasil	136,3
2. Dana Alokasi Umum	396,0
3. Dana Alokasi Khusus	185,8
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	53,4
b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	130,3
c. Hibah kepada Daerah	2,1
4. Dana Otonomi Khusus	17,2
a. Dana Otsus Provinsi-Provinsi di Papua	8,9
b. Dana Otsus Provinsi Aceh	4,0
c. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi-provinsi di Papua	4,4
5. Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta	1,4
6. Dana Desa	70,0
7. Insentif Fiskal	8,0
TOTAL	814,7

Anggaran TKD pada APBN tahun anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp814.718,5 miliar, lebih tinggi sebesar Rp15.616,7 miliar atau 2,0 persen dibandingkan outlook tahun 2022. Peningkatan anggaran TKD pada tahun 2023 sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di daerah melalui dukungan pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kegiatan pembangunan lainnya. Pengalokasian TKD untuk daerah pemekaran termasuk di wilayah Papua yang dibentuk setelah tanggal 30 Juni tahun berkenaan dihitung secara proporsional dari TKD daerah induk antara lain berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah target layanan, lokasi, dan/atau status daerah penghasil DBH.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai efisiensi dan transparansi Anggaran Pendapatan Negara (APBN) Indonesia tahun 2023, efisiensi belanja negara menjadi krusial, terutama dalam menghadapi kenaikan inflasi, perubahan kurs rupiah, dan dinamika faktor makroekonomi. Pentingnya kontrol terhadap belanja negara agar penggunaan sumber daya dapat dioptimalkan untuk mencapai hasil yang lebih besar.

Penerimaan negara pada APBN 2023 ditargetkan sebesar Rp2.463,0 triliun, yang sebagian besar berasal dari penerimaan perpajakan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan perpajakan ditargetkan tumbuh sebesar 5,0 persen, didukung oleh optimalisasi kebijakan, pemulihan ekonomi, dan reformasi administrasi perpajakan. PNBP diperkirakan mencapai Rp441,4 triliun, dengan proyeksi pengaruh pergerakan harga komoditas yang mengalami moderasi.

Belanja negara pada APBN 2023 sebesar Rp3.061.176,3 triliun, yang dialokasikan untuk Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah. Belanja Pemerintah Pusat mencakup program-program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, penurunan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan pemeliharaan stabilitas ekonomi. Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) meningkat sebesar Rp15.616,7 miliar atau 2,0 persen dibandingkan dengan outlook tahun 2022. Peningkatan TKD sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk mendukung pembangunan di daerah, kesejahteraan masyarakat, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariel, M., Hadi, A., Irgi, M., Afif, M. R., & Simangunsong, F. (2022). *Pertahanan Pada Anggaran Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sekto Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Buku II Nota Keuangan beserta APBN Tahun Anggaran 2023. KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
- Pendapatan Dan Belanja Negara Increasing Factors for The Budget Allocation Of The Ministry Of Defense Within The 2022 State Budget. 149–167.
- Rahmayani, M. W., & Kurnadi, E. (2022). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi pada Seluruh Desa di Kecamatan Kadipaten). *Entrepreneur: Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan*, 3(2), 703–713.
- Rusmita, S. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Kewirausahaan (JBIK)*, 5(3).
- Salwah, A. (2019). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 9(2), 164–182.